

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Amin Hidayat, et.al. 2019. *Dinamika In Absentia Dalam Penegakan Hukum Pemilu*. Bawaslu Kabupaten Kampar, Bangkinang Kota.
- Andi Sofyan. 2017. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media.
- Andi Hamzah. 1990. *Hukum Acara Pidana Indonesia Untuk Fakultas Hukum*. Bandung: Alumni.
- 2018. *Hukum Pidana Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Budi Rizki, Husin. 2020. *Lembaga Penegak Hukum*. Jakarta: Studi Lembaga Penegak Hukum.
- Cik Hasan Basri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fence M. Wantu. 2001. *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Surabaya: Mandar Maju.
- Mohammad Daud Ali. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Jakarta: Binacipta.
- Salim HS dan Erlies SN. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan ke -1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarwan Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Jakarta: Depdiknas.
- Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pemilihan Kepala daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam Sistem Pemilu Menurut UUD 1945*. Surabaya: Prestasi Pustaka.
- W.J.S Poerwadarminta. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yudi Krismen, U. S. 2022. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan, Laporan dan Penanganan Pelanggaran.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

C. Jurnal/Artikel Internet

- Ahmad Yani, “Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Elektronik Pada Pelaksanaan Pemilu 2024, Urgence Of Regulation Of Criminal Actions In Electronic Election Implementation In 2024 Pendahuluan Penggunaan Teknologi Atau Sistem Elektronik Pemilu Merupakan Inovasi Dalam ,” No. 19 (2024): 161–82.
- Akli, Zul, “Peradilan *In Absentia* terhadap Terdakwa yang Belum Di-periksa pada Tingkat Penyidikan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum Edisi 8 (1)*, 2020.
- Al Masyhur, Sayyid Umar, Pemayun, Tjokorda Istri Kumari Maharatu, Pertiwi, Luh Putu Rahayu Gita, & Arta, Komang Giri, “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM)”. *Perspektif Hukum*, 2021.
- Ardhyansah, Risky Fany, “Penyidikan *In Absentia* dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Sebuah Alternatif Penerapan Asas Peradilan Cepat)”. *Jurnal Idea Hukum*, 6 (1).
- Ardiansyah Girsang, “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh”, *Jurnal Cendekia*, Volume 1, Issue 2 (2023): 107-131.
- Arly Y. Mangoli, “Eksistensi Peradilan *In Absentia* Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia Menurut KUHAP”, dalam *jurnal Lex Crimen*, Volume V., No.3., (2016).

- Astri Dwi Andriani, "Demokrasi Damai Di Era Digital," *Rampai Jurnal Hukum* (RJH) 1, no. 1 (2022): 38–47, <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i1.1663>.
- Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309, <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i2.1202>.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana* (Pidato Pengukuhan pada peresmian penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 24 Juni 1994).
- Cicin Yulianti, "Mengenal Jenis Peradilan di Indonesia", <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6353738/mengenal-jenis-peradilan-di-indonesia-ada-apa-saja>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024.
- Deramayati, Tiara Yahya, & Wicaksana, Satria Unggul, "Peradilan *In Absentia* Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 2021.
- Dewi Sulistyoningsih Permatasari, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)," *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, No. November (2015): 219–28.
- Ferinda K Fachri", Jamintel: Peran Jaksa Sangat Sentral dalam Penanganan Pidana Pemilu", diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/jamintel--peran-jaksa-sangat-sentral-dalam-penanganan-pidana-pemilu-lt65657d03defcc>, tanggal akses 25 Desember 2024.
- Julius Anggiat Lamhot Turnip, "Aspek Kepastian Hukum Dalam Batasan Waktu Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara)", Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area Medan 2019.
- Khairul Fahmi, "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, No. 2, Juni 2015.

- Mardjono Reskodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Melihat Pada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Muntahar, Teuku Isra, Ablisar, Madiasa, & Bariah, Chairul, “Perampasan Aset Korupsi Tanpa Pemidanaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2 (1), 2021.
- Nina Yulawati, “Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Pemilu Oleh Gakumdu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Jurnal Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial* Volume 3, No. 1 Mei 2021, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, Indonesia, 2021.
- OC. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana : Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Purwanta, I. Wayan Kusuma, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Karma, Ni Made Sukaryati, “Akibat Hukum Bagi Prajurit TNI Melakukan Tindak Pidana Desersi Yang Diputus In Absentia Dalam Praktek Pengadilan Militer III-14 Denpasar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 2021.
- Ratnia Solihah dan Siti Witianti, “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi”, *Jurnal Bawaslu* Vol. 3 No. 1 Tahun 2017.
- Sukawati Lanang P Perbawa, “Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 3, No. 1,(2019).
- Tiara Yahya Deramayati dan Satria Unggul Wicaksana, “Peradilan In Absentia Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Hak Pembelaan Terdakwa dalam Perspektif HAM”, dalam *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7., Nomor 2, (2021).